

FOCUS GROUP DISCUSSION

“Kegagalan Sistem Pengereman Pada Kendaraan Angkutan Umum”

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN

OLEH

BAMBANG HERMANTO, M.Sc

KEPALA SEKSI INSPEKSI DAN PENANGANAN KESELAMATAN



DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

DATA DAN FAKTA

NO	MENURUT JENIS KENDARAAN	SATUAN / UNIT	JUMLAH KENDARAAN	%
1	Sepeda Motor	Unit /	108883	72%
2	Mobil Penumpang	Unit /	18147	12%
3	Mobil Barang	Unit /	19242	13%
4	Bus	Unit /	4808	3%
5	Ransus	Unit /	1050	1%
JUMLAH			152130	100%



Keterlibatan Bus & Truk dalam kecelakaan lalu lintas jalan pada tahun 2014 sebesar 3% dan 13%.

**TINGGINYA FATALITAS
AKIBAT KECELAKAAN
ANGKUTAN UMUM
→ Mengikis Citra &
Mengancam Bisnis !**



Sabtu 23/2/2013, Kecelakaan Truk Tronton di Cianjur, 16 orang meninggal & 12 luka-luka.

Senin 10/6/2013, Kecelakaan Karambol Bus pariwisata dengan 6 kendaraan lainnya di Tol Cipularang Km 87+400, 3 orang meninggal dunia

Minggu, 12/5/2013, Kecelakaan Bus masuk jurang di Desa Manggar, Kabupaten Rembang,, 6 orang meninggal 13 orang terluka.

Jumat 31/5/2013, Tabrakan antara bus dan truk di Kabupaten Batubara Sumut, 4 orang meninggal & 7 orang luka.

Jum"at 19/4/13, Kecelakaan Truk dengan Mobil Boks di Tol Palimanan-Kanci, Jawa Barat, 3 orang meninggal.

Kecelakaan di tol Pali-Kanci 14 juli 2015, 11 tewas

Kecelakaan Bus di di Sidoarjo selasa 13/10 2014, 7 penumpang tewas

Kecelakaan truk barang yang mengangkut anak anak tewas krn masuk jurang

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

DATA DAN FAKTA



SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

DATA DAN FAKTA

HASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM (RAMPCHECK)

Angkutan Penumpang

DATA RAMPCHECK NASIONAL DITJEN HUBDAT

JENIS LAYANAN	TARGET		PEMERIKSAAN BUS		
	KENDARAAN	PEMERIKSAAN	JML. KENDARAAN	RATA-RATA DIPERIKSA	%
AKAP	12.000	16.289	7.221	2,26	60,18
AKDP	5.000	9.610	3.386	2,84	67,72
PARIWISATA	2.000	317	243	1,30	12,15

TOTAL PEMERIKSAAN [**26.216 BUS**]

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



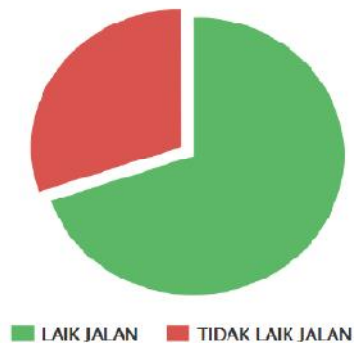
DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

DATA DAN FAKTA

HASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM (RAMPCHECK)

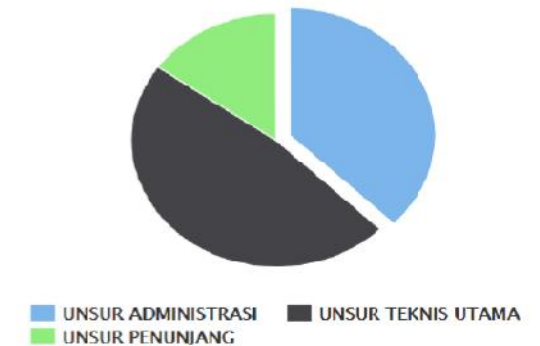
Angkutan Penumpang

TOTAL PEMERIKSAAN [26.216 BUS]



A. TOTAL LAIK JALAN	: 18.339	BUS	(69,95 %)
1. DIJINKAN OPERASIONAL	: 15.838	BUS	(86,36 %)
2. PERINGATAN / PERBAIKI	: 2.501	BUS	(13,64 %)
B. TOTAL TIDAK LAIK JALAN	: 7.877	BUS	(30,05 %)
1. DITILANG & DILARANG OPERASIONAL	: 6.296	BUS	(79,93 %)
2. DILARANG OPERASIONAL	: 1.581	BUS	(20,07 %)

TOTAL PELANGGARAN [16.674 PELANGGARAN]



A. UNSUR ADMINISTRASI	: 6.296	PELANGGARAN	(37,76 %)
B. UNSUR TEKNIS UTAMA	: 7.877	PELANGGARAN	(47,24 %)
C. UNSUR PENUNJANG	: 2.501	PELANGGARAN	(15,00 %)

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



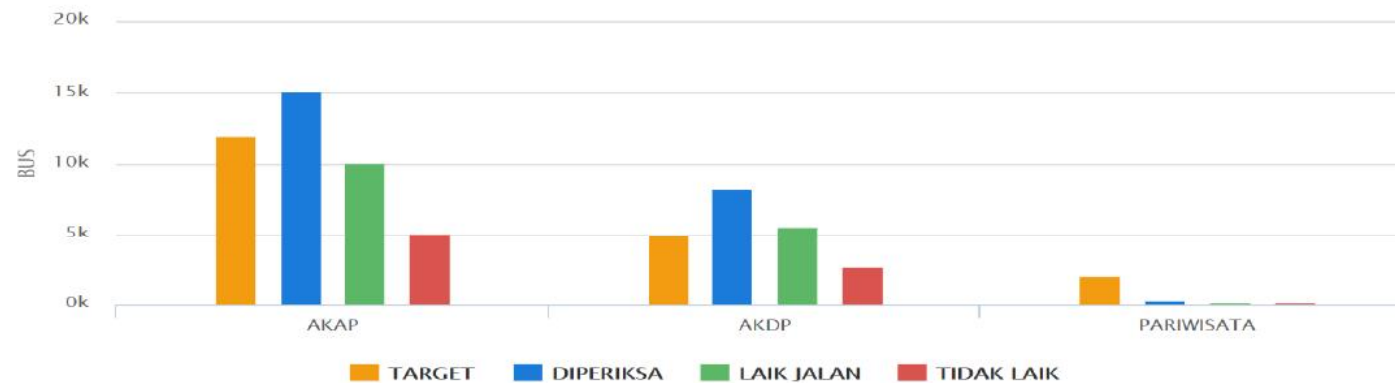
DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

DATA DAN FAKTA

HASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM (RAMPCHECK)

Angkutan Penumpang

TOTAL KENDARAAN SESUAI LAYANAN TRAYEK



A. AKAP	: 16.289 BUS
1. DIJINKAN OPERASIONAL	: 10.132 BUS (66,86 %)
2. PERINGATAN / PERBAIKI	: 1.092 BUS (7,21 %)
3. TIDAK LAIK JALAN	: 5.065 BUS (33,42 %)
B. AKDP	: 9.610 BUS
1. DIJINKAN OPERASIONAL	: 5.548 BUS (67,61 %)
2. PERINGATAN / PERBAIKI	: 1.396 BUS (17,01 %)
3. TIDAK LAIK JALAN	: 2.666 BUS (32,49 %)
C. PRIWISATA	: 317 BUS
1. DIJINKAN OPERASIONAL	: 158 BUS (52,15 %)
2. PERINGATAN / PERBAIKI	: 13 BUS (4,29 %)
3. TIDAK LAIK JALAN	: 146 BUS (48,18 %)

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

DATA DAN FAKTA

HASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM (RAMPCHECK)

Angkutan Barang

TOTAL PEMERIKSAAN [3.111 KEND]



LAIK JALAN TIDAK LAIK JALAN

A. TOTAL LAIK JALAN	: 1.671	KEND	(53,71 %)
1. DIJILANG OPERASIONAL	: 1.510	KEND	(90,37 %)
2. PERINGATAN / PERBAIKI	: 161	KEND	(9,63 %)
B. TOTAL TIDAK LAIK JALAN	: 1.440	KEND	(46,29 %)
1. DITILANG & DILARANG OPERASIONAL	: 835	KEND	(57,99 %)
2. DILARANG OPERASIONAL	: 605	KEND	(42,01 %)

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

DATA DAN FAKTA

HASIL INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM (RAMPCHECK)

Angkutan Barang

TOTAL PELANGGARAN [2.436 PELANGGARAN]



■ UNSUR ADMINISTRASI ■ UNSUR TEKNIS UTAMA ■ UNSUR PENUNJANG

A. UNSUR ADMINISTRASI	: 835	PELANGGARAN (34,28 %)
B. UNSUR TEKNIS UTAMA	: 1.440	PELANGGARAN (59,11 %)
C. UNSUR PENUNJANG	: 161	PELANGGARAN (6,61 %)

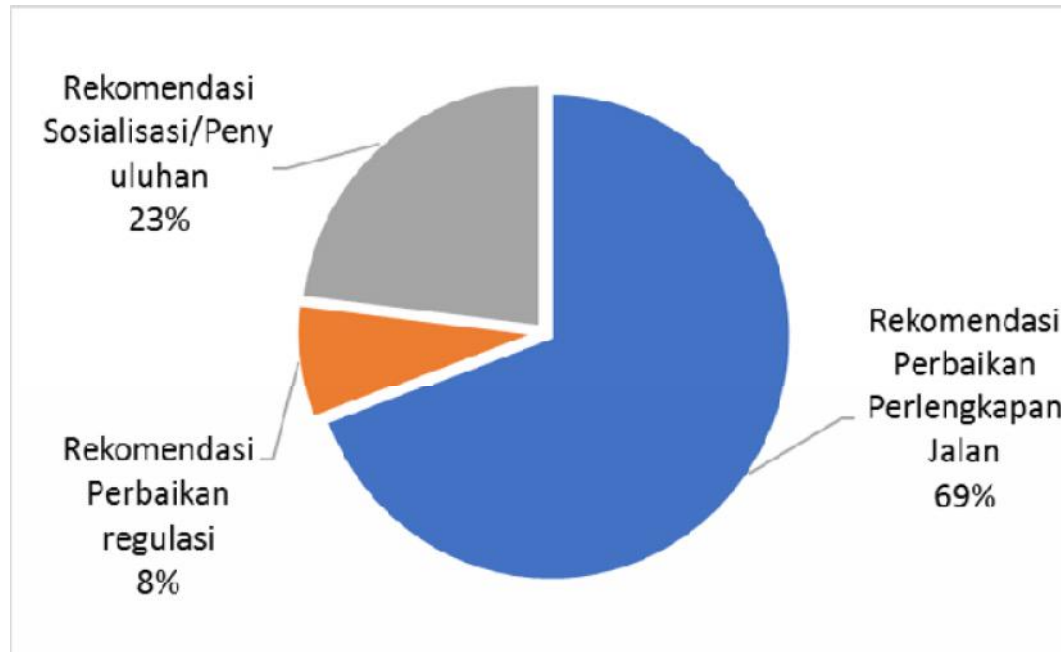
SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

DATA DAN FAKTA

REKOMENDASI KNKT KE DITJEN HUBDAT,
2007 s/d 2017



SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

PENERAPAN SMK

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ

❑ Pasal 27

Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

PENERAPAN SMK

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ

❑ Pasal 27

Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



APA ITU SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PADA ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

PENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAP BERDASARKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)

Provinsi Jawa Timur

NO	NAMA PERUSAHAAN	FORMULIR & BOBOT										NILAI RATA - RATA	TOTAL NILAI BOBOT	KATEGORI
		A. ASPEK REGULASI		B. ASPEK PENGEMUDI		C. ASPEK KENDARAAN		D. ASPEK BENGKEL		E. ASPEK MANAJEMEN				
		NILAI	20%	NILAI	25%	NILAI	20%	NILAI	15%	NILAI	20%			
1	MEDALI MAS	3,50	0,70	3,31	0,83	3,22	0,64	4,00	0,60	3,67	0,73	3,54	3,51	B
2	SARI INDAH	3,25	0,65	2,81	0,70	3,67	0,73	3,83	0,58	4,00	0,80	3,51	3,46	B
3	SUMBER KENCONO	3,38	0,68	2,31	0,58	3,44	0,69	4,00	0,60	4,00	0,80	3,43	3,34	B
4	AKAS NNR	3,50	0,70	2,69	0,67	3,33	0,67	3,67	0,55	3,67	0,73	3,37	3,32	B
5	DAHLIA INDAH	3,50	0,70	2,50	0,63	3,00	0,60	4,00	0,60	2,83	0,57	3,17	3,09	B
6	MANDALA	3,25	0,65	2,69	0,67	3,11	0,62	3,33	0,50	2,83	0,57	3,04	3,01	B
7	MAJU UTAMA	3,38	0,68	2,25	0,56	3,00	0,60	4,00	0,60	2,83	0,57	3,09	3,00	B
8	MENGKALA	3,00	0,60	2,31	0,58	3,11	0,62	3,33	0,50	3,50	0,70	3,05	3,00	B
9	EKA - MIRA	3,38	0,68	2,00	0,50	3,22	0,64	3,33	0,50	3,33	0,67	3,05	2,99	C
10	MOEDAH	2,88	0,58	2,69	0,67	3,22	0,64	4,00	0,60	2,33	0,47	3,02	2,96	C
11	SANTOSO	3,38	0,68	2,69	0,67	2,78	0,56	3,17	0,48	2,50	0,50	2,90	2,88	C
12	HARAPAN JAYA	3,13	0,63	2,50	0,63	2,89	0,58	3,00	0,45	2,67	0,53	2,84	2,81	C
13	AKAS ASRI	3,25	0,65	2,44	0,61	2,67	0,53	3,00	0,45	2,33	0,47	2,74	2,71	C
14	JAWA INDAH	2,63	0,53	2,13	0,53	3,89	0,78	3,17	0,48	2,00	0,40	2,76	2,71	C
15	KURNIA JAYA	2,63	0,53	1,56	0,39	3,33	0,67	3,17	0,48	2,67	0,53	2,67	2,59	C
16	ZENA	3,13	0,63	2,38	0,59	3,11	0,62	2,17	0,33	2,00	0,40	2,56	2,57	C
17	INDONESIA	3,25	0,65	2,13	0,53	2,56	0,51	3,33	0,50	1,83	0,37	2,62	2,56	C
18	JAYA UTAMA	3,13	0,63	2,13	0,53	2,56	0,51	3,33	0,50	1,83	0,37	2,59	2,53	C
19	BOROBUDUR INDAH	2,75	0,55	2,06	0,52	3,11	0,62	3,33	0,50	1,67	0,33	2,58	2,57	C

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

PENILAIAN PERUSAHAAN BUS (PO) AKAP BERDASARKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)

Provinsi DIY

NO	NAMA PERUSAHAAN	FORMULIR & BOBOT										NILAI RATA - RATA	TOTAL NILAI BOBOT	KATEGORI
		A. ASPEK REGULASI		B. ASPEK PENGEMUDI		C. ASPEK KENDARAAN		D. ASPEK BENGKEL		E. ASPEK MANAJEMEN				
		NILAI	20%	NILAI	25%	NILAI	20%	NILAI	15%	NILAI	20%			
1	PRAYOGO	3,25	0,65	3,13	0,78	3,78	0,76	3,67	0,55	3,83	0,77	3,53	3,50	B
2	SUHARNO	3,13	0,63	3,13	0,78	3,78	0,76	3,67	0,55	3,83	0,77	3,51	3,48	B
3	CITRA ADI LANCAR	3,13	0,63	3,13	0,78	3,22	0,64	3,67	0,55	3,83	0,77	3,39	3,37	B
4	MAJU LANCAR	3,13	0,63	3,13	0,78	3,22	0,64	3,67	0,55	3,50	0,70	3,33	3,30	B
5	RAHARJA PUTRA MULYA	3,00	0,60	2,50	0,63	3,22	0,64	3,67	0,55	0,00	0,00	2,48	2,42	C
6	SUMBER WARAS	2,63	0,53	1,94	0,48	2,78	0,56	2,83	0,43	1,83	0,37	2,40	2,36	D

Keterangan :

- * Jumlah sementara data perusahaan yang masuk sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 = 44 Perusahaan
- * Kategori **A** total nilai 3,60 - 4,0
- * Kategori **B** total nilai 3,00 - 3,59
- * Kategori **C** total nilai 2,40 - 2,99
- * Kategori **D** total nilai $\leq 2,39$

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

DEFINISI

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah **bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum** berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh **perusahaan angkutan umum** secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

TUJUAN

- ❑ Mencegah kerugian akibat kejadian yang tidak diinginkan akibat kegiatan angkutan
- ❑ Menjamin kelancaran transportasi
- ❑ Menjaga keselamatan konsumen
- ❑ Meningkatkan kepuasan pelanggan

Memastikan tata kelola keselamatan bagi perusahaan dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan

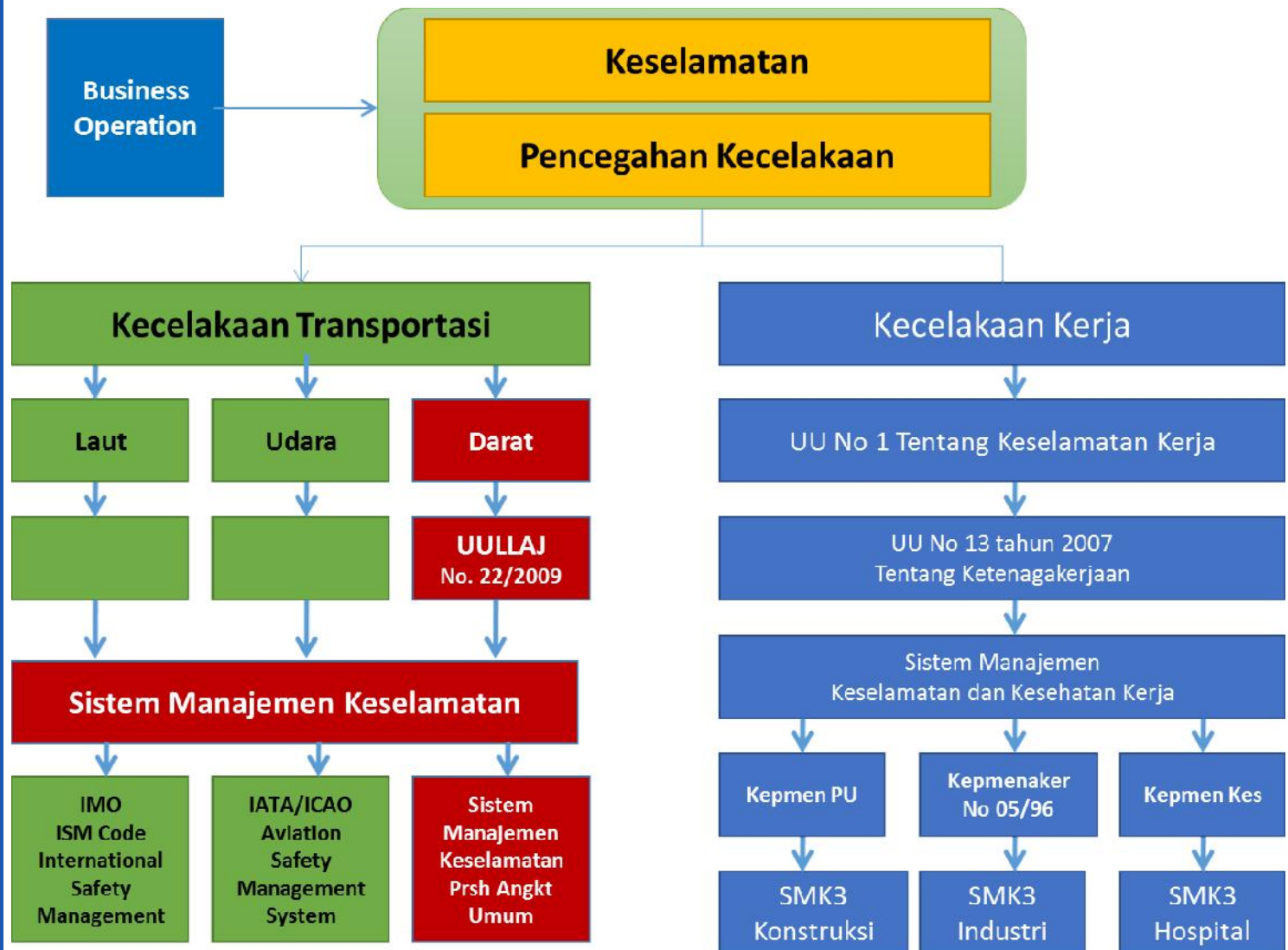
SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

PERLUNYA SMK



SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

KERANGKA KERJA SMK TRANSPORTASI



SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

1. Komitmen dan kebijakan
2. Pengorganisasian
3. Manajemen bahaya dan resiko
4. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor
5. Dokumentasi dan data
6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan
7. Tanggap darurat
8. Pelaporan kecelakaan internal
9. Monitoring dan evaluasi
10. Pengukuran kinerja

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dilakukan oleh petugas/unit yang bertanggung jawab di bidang sistem manajemen angkutan umum

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

1 KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

POKOK PIKIRAN :

Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan adalah suatu pernyataan dari perusahaan tentang komitmen terhadap keselamatan yang menjadi salah satu standar minimal dalam pelayanan jasa angkutan yang harus diwujudkan baik keselamatan untuk penumpang maupun pengemudi bahkan bagi pengguna jalan yang lain.

**visi, misi, kebijakan, dan sasaran
perusahaan**

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

2 PENGORGANISASIAN

POKOK PIKIRAN:

Perusahaan harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas untuk semua posisi yang menunjukkan tugas keselamatan angkutan. Ini merupakan langkah penting dalam mengembangkan sistem manajemen keselamatan sebagai kewajiban para manajer dan staf yang memperhatikan keselamatan operasi untuk penumpang dan pengemudi. Manajemen juga harus memiliki mekanisme di tempat kerja untuk memastikan bahwa perubahan sistem dan atau prosedur yang memiliki implikasi keselamatan harus diketahui oleh seluruh karyawan.

**struktur organisasi, tugas dan
fungsi unit organisasi perusahaan
angkutan umum**

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

3 MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO

POKOK PIKIRAN :

Elemen ini mengharuskan adanya persyaratan untuk identifikasi bahaya dan resiko, perencanaan potensi konsekuensi dan implementasi untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya hal tersebut.

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

4 FASILITAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

POKOK PIKIRAN :

Setiap perusahaan angkutan umum mempunyai fasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

5 DOKUMENTASI DAN DATA

POKOK PIKIRAN :

Perusahaan angkutan umum diharapkan memahami fungsi keselamatan utama dan prosesnya dalam mengembangkan dokumentasi standar.

Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumberdaya yang berpotensi misalnya peralatan, karyawan, dan sistem tertentu. Hasil identifikasi ini berupa data yang senantiasa diperbaharui (up to date)

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

6 PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN

POKOK PIKIRAN :

Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi bagi awak kendaraan sehingga dapat memiliki pengemudi yang profesional , yang kompeten dengan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan attitude yang baik harus menjadi hal yang prioritas bagi perusahaan.

sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga yang ditunjuk

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

7 TANGGAP DARURAT

POKOK PIKIRAN :

Dalam perusahaan angkutan perlu untuk memiliki sebuah tim yang bertanggung jawab membuat dan mengimplementasikan prosedur untuk menafsirkan resiko operasi yang rutin ataupun tidak rutin dan membuat perencanaan tanggap darurat terhadap resiko yang signifikan dan perencanaan tersebut harus dievaluasi secara berkala.

**Standar Prosedur Operasi
untuk menghadapi setiap keadaan
darurat**

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

8 PELAPORAN KECELAKAAN INTERNAL

POKOK PIKIRAN :

Penyelidikan dan pelaporan kecelakaan berguna sebagai bahan untuk mempelajari faktor-faktor kecelakaan yang mungkin terjadi dan digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan resiko. Investigasi juga berguna untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi kecelakaan yang berguna untuk pencegahan kecelakaan yang sama

Laporkan secara internal
setiap kecelakaan lalu
lintas

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

9 MONITORING DAN EVALUASI

POKOK PIKIRAN :

Sistem Manajemen Keselamatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa dilakukan audit dan evaluasi secara berkala. Tujuan utama dari audit dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa suatu perencanaan menyangkut keselamatan sudah diterapkan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

10 PENGUKURAN KINERJA

POKOK PIKIRAN :

Pada prinsipnya pengukuran dan pemantauan kinerja berlaku untuk segenap unsur yang terkait dengan keselamatan angkutan. Namun demikian prioritas dapat diberikan kepada unsur yang langsung terkait dengan keselamatan transportasi yaitu tim teknis, surveyor dan operator (kru/ pengemudi)

KEGIATAN BERKALA UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESELAMATAN PELAYANAN ANGKUTAN, YANG DINYATAKAN DENGAN :

- RATIO ANTARA JUMLAH KECELAKAAN DENGAN KENDARAAN KILOMETER
- RATIO ANTARA KORBAN KECELAKAAN DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

- ❖ PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM WAJIB MEMBUAT, MELAKSANAKAN DAN MENYEMPURNAKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN BERPEDOMAN PADA RUKUN LLAJ
- ❖ PEMBUATAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DILAKUKAN DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 BULAN SEJAK IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DIBERIKAN
- ❖ SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM YANG TELAH DIBUAT DILAPORKAN KEPADA PEMBERI IZIN PENYELENGGARAN ANGKUTAN UMUM SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SMK ANGKUTAN UMUM

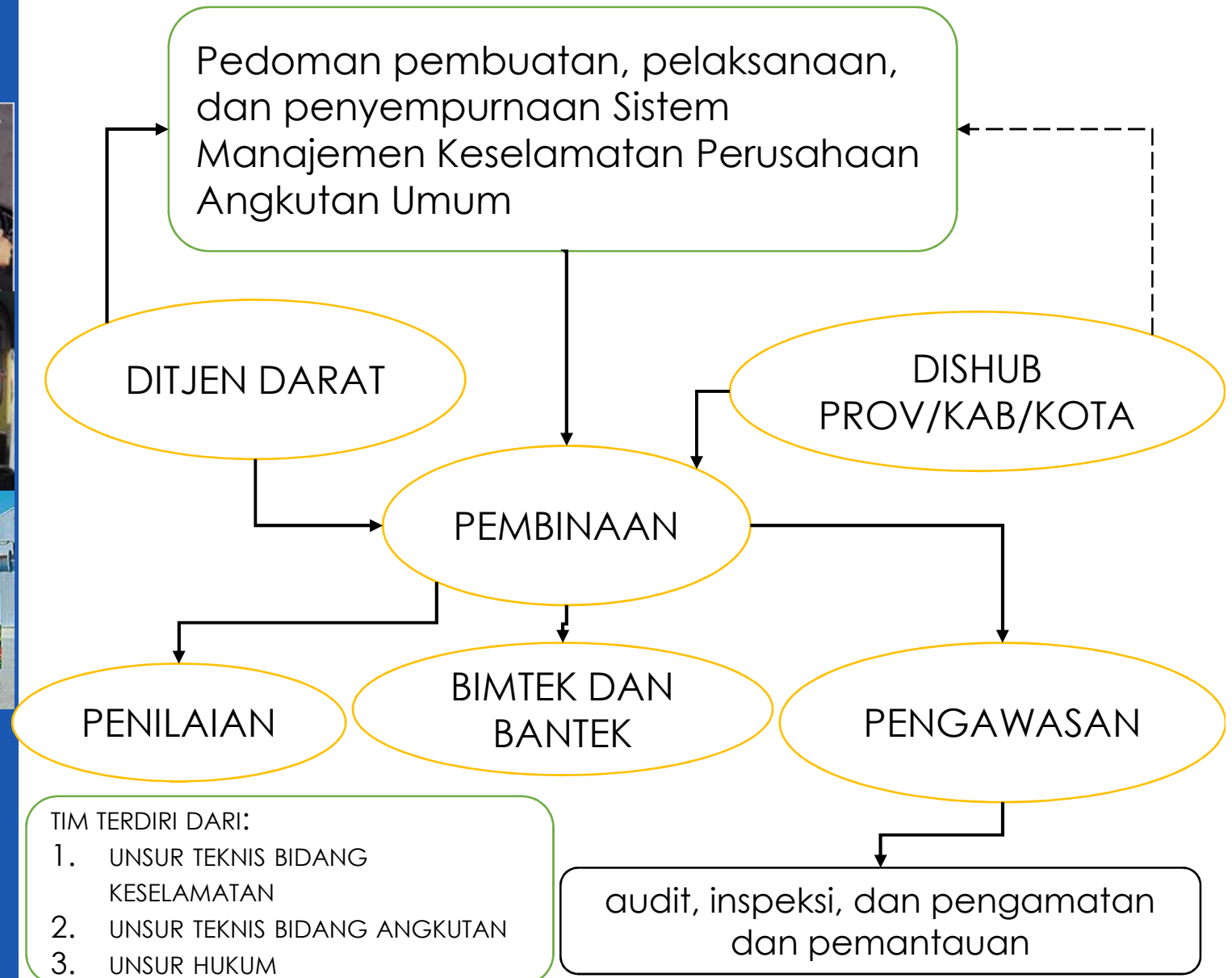
Perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh izin angkutan sebelum peraturan pemerintah ini ditetapkan, WAJIB membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

TUGAS PEMERINTAH

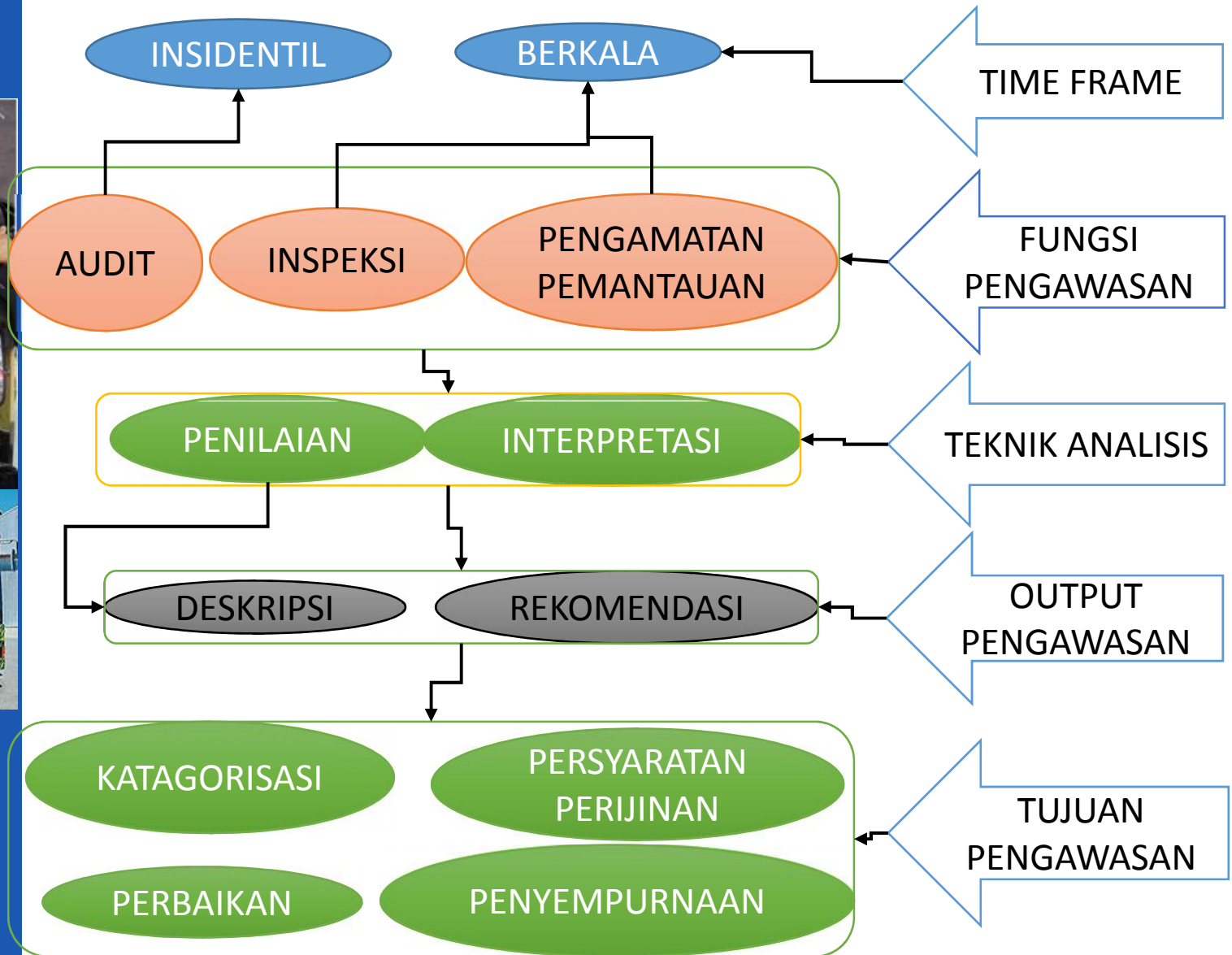


SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

TUGAS PEMERINTAH PEMBINAAN



SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI

SANKSI

Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa:

- peringatan tertulis:
 - Paling banyak 2 kali dengan jangka waktu 30 hari
- pembekuan izin:
 - Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak peringatan tertulis tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.pencabutan izin:
 - Dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak tanggal pembekuan izin, pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

SMK PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM



TERIMA KASIH



DITJEN HUBDAT
KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN RI